

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 1986. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. 2014. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014*. <https://banyumaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/20> diakses tanggal 8 Januari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2009*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2010*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2011*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2012*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2013*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2014*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *e-Billing*. <http://www.pajak.go.id/e-billing> diakses tanggal 15 September 2016.
- Ghozali, I. 2014. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Himawan, A. & Hapsari D.K. 2016. *Ini Dampak Luas dari Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak*. <http://www.suara.com/bisnis/2016/04/11/171305/ini-dampak-luas-dari-peningkatan-penghasilan-tidak-kena-pajak> diakses tanggal 11 September 2016.
- Kementerian Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern*.

- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.*
- Kementerian Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 - 2019.*
- Kementerian Keuangan. 2016. APBN-P. <http://www.kemenkeu.go.id/APBNP2016> diakses tanggal 15 September 2016.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*
- Kresna, Y., & Suandy, E. 2014. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi UAJY 2014.*
- Mankiw, N. G., Quah, E. & Wilson, P. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia Volume 2.* Jakarta: Salemba Empat.
- Nursanti I., & Padmono, Y.Y. (2013). Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, hal. 122-136.
- Pandiangan, D. S. U., & Suandy, E. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Ekonomi UAJY 2014.*
- Prayudi, A. 2010. Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Mandiri*, Vol.5, No.1, hal. 1-14.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9 No. 1, hal. 1-9.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusjdi, M. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Indeks.
- Sadiq, M. L., Kumadji, S., & Husaini, A. 2015. Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 7 No. 1, hal. 1-5.
- Sitio, R., Basri Y. M., & Silalahi, S. P. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Jom. FEKON*, Vol. 2 No. 2, hal. 1-15.
- Soemitro, R. & Sugiharti, D.K. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, E. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. 2003. *Sebuah Analisis Konstruktif Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2013. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Trisnayanti, I. A., & Jati, I. K. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 13 No. 1, hal. 292-310.

Ujiyantho, M. A., & Pramuka, B. A. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan go public Sektor Manufaktur). *Jurnal Simposium Akuntansi X tahun 2007*.

Utari, W. 2008. Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *NeO-Bis*, Vol. 2 No. 1, hal. 55-70.

Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia: Buku Dua*. Jakarta: Salemba Empat.